



PENGAMBILALIHAN KEKUASAAN KABINET SJHRIR OLEH PERSATUAN PERJUANGAN PADA 3 JULI 1946

Pipit Nur 'Aini

Universitas Negeri Semarang

email: pipitnuraini9@students.unnes.ac.id

DOI: 10.22437/js.v3i1.24509

Received: 9/April/2023, Revised: 24/April/2023, Accepted: 16/Juni/2023

ABSTRACT

Sutan Sjahrir was Indonesia's first prime minister during the revolutionary period who had intellectuals, idealism and nationalism. Sutan Sjahrir was born in Padang, Pajang, West Sumatra on March 5, 1909, the son of Mohammad Rasa and Puti Siti Rabiah. In this paper, the author will discuss one of the historical events in Indonesia. The main problem raised in this writing is how the process of the takeover of the Sjahrir cabinet by the Persatuan Perjuangan took place on July 3, 1946. Therefore, the purpose of this writing is to provide information to readers about the takeover of the Sjahrir cabinet by the Persatuan Perjuangan on July 3, 1946. In this context, the author uses historical writing methods, namely collecting sources, determining sources, interpreting, and writing with a qualitative approach. The result of writing the program is that the discussion regarding the takeover of cabinet power is closely related to the selection of a diplomatic path to defend Indonesia which resulted in the kidnapping of Sutan Sjahrir at the encouragement of Muhammad Yamin and Mayor General Soedarsono then there was a feeling of disappointment from the youth and the Masyumi party while at the same time dragging the Persatuan Perjuangan and Tan Malaka who tends to choose the path of armed struggle. As is well known, this event was the first time a cabinet takeover occurred.

Keywords: Power, Sjahrir Cabinet, Persatuan Perjuangan, Indonesia

ABSTRAK

Sutan Sjahrir merupakan seorang perdana menteri pertama Indonesia pada masa revolusioner yang memiliki intelektual, idealisme dan nasionalisme. Sutan Sjahrir lahir di Padang, Pajang, Sumatra Barat pada 5 Maret 1909, putra dari Mohammad Rasa dan Puti Siti Rabiah. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai salah satu peristiwa sejarah di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana proses terjadinya pengambilalihan kekuasaan Kabinet Sjahrir oleh Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946. Oleh karena itu, tujuan dalam penulisan ini adalah memberikan informasi terhadap pembaca mengenai peristiwa pengambilalihan kekuasaan Kabinet Sjahrir oleh Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode penulisan sejarah yaitu antara lain pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penulisan menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai pengambilalihan kekuasaan kabinet erat kaitannya dengan pemilihan jalur diplomasi guna mempertahankan Indonesia yang berakibat pada penculikan Sutan Sjahrir atas dorongan dari Muhammad Yamin dan Mayor Jendral Soedarsono kemudian adanya rasa kekecewaan dari kaum pemuda dan partai Masyumi sekaligus menyeret Persatuan Perjuangan dan Tan Malaka yang cenderung memilih jalur perjuangan senjata. Sebagaimana yang diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan pertama kalinya pengambilalihan kekuasaan kabinet terjadi.

Kata kunci: Kekuasaan, Kabinet Sjahrir, Persatuan Perjuangan, Indonesia.

PENDAHULUAN

Sutan Sjahrir merupakan seorang perdana menteri pertama Indonesia pada masa revolusioner yang memiliki intelektual, idealisme dan nasionalisme. Sutan Sjahrir lahir di Padang, Pajang, Sumatra Barat pada 5 Maret 1909, putra dari Mohammad Rasa dan Puti Siti Rabiah. Sutan Sjahrir menempuh pendidikan di MULO, dilanjut AMS di Bandung. Sewaktu Sjahrir sekolah di AMS, ia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis), aktif dalam klub debat, dan aktif dalam kegiatan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada 20 Februari 1927, Sjahrir berhasil menjadi salah satu dari sepuluh orang pendiri himpunan pemuda nasionalis bernama Jong Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Pemuda Indonesia.¹

Pada 1929, Sutan Sjahrir melanjutkan pendidikannya di Universitas Amsterdam, Belanda. Selama menempuh masa pendidikan di sana, Sutan Sjahrir kerap dekat dengan Mohammad Hatta. Pada 1931, Sjahrir kembali ke Indonesia dan bergabung ke dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI) sekaligus menjadi ketua organisasi tersebut.² Tak hanya itu, Sutan Sjahrir juga pernah menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia (PI).³ Dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia, Sjahrir juga ikut andil di dalamnya termasuk pada saat penculikan Soekarno dan Mohammad Hatta. Kehidupan Sjahrir tak selalu berjalan mulus, seperti pasca Sjahrir menjadi perdana menteri pertama Indonesia, ia diculik di Surakarta pada 3 Juli 1946 oleh Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan Tan Malaka dimana mereka merasa tidak puas atas keputusan diplomasi dari kabinet Sjahrir II.⁴

Tan Malaka lahir 2 Juni 1897 di Pandan Ganang Suliki, Sumatra Barat. Pemikirannya tertuang pada buku yang berjudul *Madilog* dengan maksud supaya rakyat Indonesia memiliki pemikiran secara realistis. Intinya, melalui buku tersebut Tan Malaka mengajak berfikir secara rasional dan berlandaskan pada akal. Tak hanya itu, Tan Malaka juga menulis buku yang berjudul *Muslihat* pada 2 Desember 1945 di Surabaya yang tertuliskan mengenai rencana Inggris-NICA dalam melucuti senjata Jepang sekaligus pendapatnya mengenai taktik dalam upaya mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, Tan Malaka sangat memegang teguh pemikiran bahwa taktik sekaligus perjuangan senjata amat dibutuhkan. Pemikiran Tan Malaka mengenai politik kemerdekaan berbunyi "Kemerdekaan manusia mengandung "perdamaian", oleh karena itu perdamaian menjadi kunci kemakmuran, melalui kemakmuran itulah yang kemudian menjadi kunci kemerdekaan".

¹ Verelladevanka Adryamarthanino, "Sultan Sjahrir: Masa Muda, Kiprah, Penculikan, dan Akhir Hidup," *www.kompas.com*, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/22/080000479/sutan-sjahrir--masa-muda-kiprah-penculikan-dan-akhir-hidup?page=all>.

² Susanto Jumaidi, "Sutan Sjahrir, Pahit Manis dalam Kemelut Revolusi Kemerdekaan Indonesia," *https://kumparan.com/*, 2022, <https://kumparan.com/susanto-jumaidi/sutan-sjahrir-pahit-manis-dalam-kemelut-revolusi-kemerdekaan-indonesia-1xulRUwz0Jo>.

³ Setiawan Sumarno, "Sutan Sjahrir, Sosialisme, Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1927-1962," *Avatara* 9, no. 1 (2020): 1 – 9.

⁴ Rofi Setiawan, *KONFLIK POLITIK SUTAN SJahrIR-TAN MALAKA TAHUN 1945-1947*, 2019.

Dalam penulisan artikel ini ada beberapa tujuan dalam rangka menelusuri proses terjadinya pengambilalihan kekuasaan kabinet Sjahrir. Pertama, memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai keadaan pasca kemerdekaan khususnya dalam mempertahankan wilayah Indonesia, baik melalui cara diplomasi atau cara perjuangan senjata. Kedua, memberikan informasi kepada pembaca mengenai partai Masyumi sebagai partai pertama di Indonesia yang menginginkan oposisi terhadap kabinet Sjahrir. Ketiga, memberikan informasi kepada pembaca mengenai awal mula pembentukan Persatuan Perjuangan dan upaya yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Dan terakhir, mengenai inti dari pembahasan artikel ini yaitu upaya penculikan Sutan Sjahrir.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif disertai metode sejarah⁵ sebagai panduan dalam melakukan metode penulisan sejarah. Adapun empat metode penulisan sejarah yang dimaksudkan, antara lain pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan.

Tahap pertama dalam penulisan ini, penulis harus mampu menemukan sumber sejarah yang sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber sekunder, misalnya seperti buku yang membahas peristiwa 3 Juli 1946. Tidak hanya buku, penulis juga menggunakan jurnal, artikel, maupun *website* relevan dengan topik penulisan sejarah yang diangkat.

Tahap kedua dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis berupa kritik kredibilitas sumber yang telah didapatkan. Dalam melakukan tahap ini, terdapat dua macam kritik sumber yaitu pertama autentisitas atau kritik ekstern, yang berkaitan dengan keaslian sumber biasanya dalam bentuk fisik seperti kertas yang sudah menguning, gaya penulisan, dan sebagainya; kedua kredibilitas atau kritik intern, yang berkaitan dengan relevansi antara bukti sumber dengan topik sejarah.

Tahap ketiga dalam penelitian ini, menafsirkan kembali dari kritik sumber yang diperoleh, dimana setiap penafsiran terdapat suatu kebenaran atau fakta, namun sebagian salah. Sebagai seorang sejarawan, harus jujur dalam mencantumkan data beserta keterangan yang diperoleh, sebab tanpa penafsiran sejarah, maka seorang sejarawan tidak akan mampu bercerita. Dari sini lah objektivitas menjadi pilihan utama supaya penulisan terhindar dari subjektivitas penulis sehingga menghasilkan data yang valid. Dari kritik sumber yang telah didapatkan, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan dan diakhiri dengan penyatuan data.

Tahap keempat dalam penulisan ini adalah penulisan sejarah. Puncak pencapaian sejarawan dalam menuliskan sejarah pastinya telah melewati tahap-tahap sebelumnya. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat diperlukan.

Menurut Kuntowijoyo dalam melakukan penyajian penulisan sejarah, harus memuat. Pertama, Pengantar. Dalam hal ini, pengantar dikemukakan dalam latar belakang, dan juga adapun permasalahan utama yang akan dijawab melalui penulisan ini. Kedua, hasil penelitian. Dalam hal ini, profesionalisme penulis akan nampak dalam

⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

fakta dan data yang mendukung dalam karya penulisan sejarah. Hasil penelitian didapatkan melalui dokumen maupun arsip sejarah, buku, dan lainnya yang harus mampu di pertanggung-jawabkan. Ketiga, simpulan berupa catatan akhir secara menyeluruh atas hasil penulisan yang dibuat. Sedangkan pendekatan dalam penulisan ini dapat dilihat dari sejarah revolusi Indonesia. Oleh karena itu, dirasa cukup penting untuk melihat Bagaimana proses terjadinya pengambilalihan kekuasaan kabinet Sjahrir oleh Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946.

PEMBAHASAN

Kedatangan koloni seperti pasukan Inggris yang sebagian besar menduduki wilayah Jawa dan Sumatra dengan dipimpin oleh Panglima Inggris, Letnan Jenderal Sir Philip Cristison segera dikirimnya pasukan kolonial Belanda ke Indonesia Timur. Tak hanya itu, di bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Hubertus Van Mook perhatian Belanda tertuju pada Indonesia Timur dikarenakan wilayah tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar dan penduduknya tidak sepenuhnya anti kolonial. Dengan munculnya pihak sekutu, ketegangan di wilayah Jawa dan Sumatra mulai meningkat. Sekitar bulan Oktober, terjadi pertempuran antara para pemuda Republik dengan orang Belanda dan Jepang. Pihak Jepang berupaya menarik kembali wilayah kekuasaan mereka khususnya kota besar dan kecil di Jawa.

Di lain sisi, pimpinan pusat yang berada di Jakarta hanya mempunyai sedikit hubungan, pengaruh, dan simpati terhadap tindakan pertempuran yang kini makin meluas. Kehadiran pihak sekutu yang lebih awal dan lebih kuat di Jakarta mengakibatkan sedikitnya kekerasan revolusioner dan pimpinan pusat cenderung terikat pada suatu revolusioner guna memperoleh pengakuan sekaligus dukungan diplomatik. Dalam hal ini, Soekarno selaku presiden tentunya amat dibutuhkan pasca kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, muncullah Sutan Sjahrir yang turut andil sebagai perdana menteri guna membantu dalam mempertahankan Indonesia.⁶

Pasca memproklamakan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menginginkan penyelesaian dengan Belanda mengenai *de facto* wilayah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, guna menyelesaikan konflik tersebut dibutuhkan pihak ketiga terutama pihak sekutu yang mampu memberikan arahan sistem pemerintahan efektif dan diplomatik. Beranjak dari hal tersebut, tepatnya pada 2 September 1945 terjadi konferensi Pangreh Praja se Jawa dan Madura. Kemudian pada 7 Oktober 1945 terjadi perubahan petisi KNIP, yang dimaksudkan untuk merubah kelembagaan eksekutif menjadi legislatif dari KNIP.⁷ Perubahan petisi tersebut disetujui oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sehingga selama dua hari, tepatnya pada 16 sampai dengan 17 Oktober 1945 dilakukan sidang guna membahas petisi tersebut. Pada sidang tersebut, terjadi pula pengajuan BP-KNIP sebagai salah satu badan yang

⁶ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: Serambi, 2008).

⁷ Adi Nusferadi, "Pembentukan Kabinet Sjahrir I dan Jalan Perjuangan Diplomasi RI," *Jurnal Sejarah Lontar* 6, no. 2 (2009): 18 – 28, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/article/view/2511>.

mewakili KNIP dengan jumlah anggota yang cenderung sedikit supaya mampu mempermudah ruang gerak KNIP dan berjalan secara efektif.

Tak hanya itu, pasca kemerdekaan juga terdapat kabinet politik yang pada saat itu memiliki pengaruh adalah kabinet Sjahrir. Selaku perdana menteri yang pada saat itu usianya masih terbilang muda, Sjahrir mampu memperoleh pengakuan dari dunia luar bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Selama Sjahrir menjabat sebagai perdana menteri, kiprahnya sangat memegang peranan penting sejak tahun 1945 hingga 1946 terutama pada masa revolusi Indonesia.⁸ Dalam melakukan proses revolusioner bangsa terutama di bidang politik, karir Sjahrir dimulai ketika dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, dimana Sjahrir terpilih menjadi Ketua BP-KNIP⁹ dan Amir Sjarifuddin sebagai wakil ketua BP-KNIP untuk bekerjasama dengan Presiden Soekarno. Adapun kepemimpinan Sjahrir yang berlangsung selama tiga periode¹⁰ sejak 14 November 1945 adalah sebagai berikut: (1) Kabinet I (14 November 1945-12 Maret 1946), (2) Kabinet II (13 Maret 1946-2 Oktober 1946, dan (3) Kabinet III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947). Setelah Sjahrir diangkat sebagai ketua KNIP, Sjahrir menulis buku dengan judul *Perjuangan Kita* yang terbit pada 10 November 1945. Dalam penulisannya, Sjahrir menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia harus bebas dari pengaruh Jepang sekaligus kecaman bagi koloni Jepang atas doktrin pendidikan dan latihan militernya sehingga hal tersebut yang akhirnya membuat para pemuda hilang akan rasa kebangsaan mencintai Indonesia dan lebih bersikap kebarat-baratan. Dalam hal ini yang kemudian menimbulkan pemikiran Sjahrir mengenai keraguannya dalam memperjuangkan Indonesia dengan pemerintahan yang demokratis dalam artian rakyat sebagai peranan terbesar di dalamnya.

Dalam upaya memperjuangkan keutuhan bangsa Indonesia, muncul dua golongan yaitu golongan yang lebih memilih menggunakan jalur diplomasi dan golongan yang lebih memilih perjuangan bersenjata. Dalam hal ini, Presiden Soekarno selaku pemimpin bangsa lebih cenderung memilih untuk mempertahankan Indonesia dengan menggunakan jalur diplomasi.¹¹ Pemilihan jalur diplomasi sejalan dengan langkah Sjahrir yang memilih melakukan perjanjian dengan Belanda guna mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengakui berdirinya Indonesia.¹² Dengan adanya jalur diplomasi tersebut, Soekarno merasa bahwa kabinet Sjahrir akan mampu mengatasi keberlangsungan hidup Indonesia. Namun demikian, pilihan Soekarno ternyata mendapat pertentangan dari kelompok Tan Malaka yang memilih untuk memperjuangkan wilayah Indonesia dengan cara perjuangan senjata. Karena adanya

⁸ Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

⁹ Umar Sabiring, Syaiful M, dan Suparman Arif, "kebijakan politik perdana menteri sutan sjahrir untuk mempertahankan kemerdekaan RI," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 1689 - 99.

¹⁰ Suryani. Hania Hanafie, "Politik Indonesia," *Politik Indonesia* 1, no. 95 (2011): 87 - 101.

¹¹ Achmad .J .A & Sumarno, "Organisasi Persatuan Perjuangan 1946" 2, no. 3 (2014).

¹² Ibnu Khaldun dan Edy Suparjan, "Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia," *SOSIOHUMANIORA : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 122 - 31.

perbedaan tersebut, akhirnya Tan Malaka memilih menghimpun masyarakat untuk melakukan oposisi terhadap kabinet Sjahrir baik di dalam kabinet maupun di luar KNIP.

Ketika kabinet Sjahrir memegang kendali pemerintah, para pemuda menaruh harapan bahwa segala persoalan akan mampu dipecahkan dengan semangat revolusioner. Namun nyatanya, terdapat ketidaksesuaian antara realita dengan harapan mereka dikarenakan kabinet Sjahrir yang cenderung berbau Belanda dan program pemerintah kabinetnya dianggap kurang tegas. Oleh karena itu, muncul kekecewaan dari para pemuda, termasuk golongan partai Masyumi¹³ sehingga menyebabkan mereka membutuhkan sosok yang tegas, seperti Tan Malaka.

Partai Masyumi

Selain kabinet Sjahrir, adapun partai Masyumi yang turut memberikan kontribusi dalam bidang politik mengenai permasalahan kebangsaan. Partai Masyumi dibentuk pada 7 November 1945 di Gedung Muallimin Yogyakarta. Dalam hal ini, partai Masyumi mendapat dukungan melalui partai-partai lainnya seperti NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Dalam bidang politik, kontribusi partai Masyumi seperti keikutsertaannya dalam membicarakan mengenai politik Indonesia pasca kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin. Selain itu juga, Masyumi turut aktif dalam melakukan perlawanan baik melalui jalur diplomasi maupun perjuangan senjata. Namun demikian, sejak 14 November 1945, pasca pembentukan kabinet Sjahrir keadaan politik Masyumi mulai berubah, dimana partai Masyumi tidak diikutsertakan dalam kursi pemerintahan. Seringkali antara partai Masyumi dengan kabinet Sjahrir terjadi pertentangan, yang mana Masyumi kurang setuju apabila Sjahrir menempuh jalur diplomasi dengan pihak Belanda. Oleh karena itu, Masyumi juga menginginkan adanya oposisi pada kabinet Sjahrir sekaligus mengembalikan mandatnya ke Soekarno. Pertentangan dengan kabinet Sjahrir makin memuncak ketika adanya perjanjian Linggarjati, dimana Masyumi menganggap bahwa hal tersebut akan merugikan kedaulatan Indonesia secara *de facto*.¹⁴ Walaupun partai Masyumi tidak mendukung adanya kebijakan Sjahrir, terdapat upaya pemberontakan yang paling mencolok terjadi pada tanggal 4 Januari 1946, Tan Malaka beserta golongannya mengajak untuk bertindak secara radikal untuk menggulingkan atau merobohkan kabinet Sjahrir dengan cara membentuk wadah perjuangan yang diberi nama Persatuan Perjuangan.¹⁵

Persatuan Perjuangan

Di Gedung serbaguna Purwokerto diadakan kongres pertama Persatuan Perjuangan yang dilaksanakan pada 3 sampai dengan 5 Januari 1946 untuk membahas mengenai masalah upaya memperjuangkan bangsa Indonesia. Kongres pertama tersebut dihadiri oleh 132 organisasi termasuk Tan Malaka dan Jendral Besar

¹³ Alfi Hafidh Ishaqro, "DINAMIKA PARTAI MASYUMI PADA MASA REVOLUSI FISIK (1945 - 1949)," *Plant Physiology* 1, no. 1 (1949): 11 - 19.

¹⁴ Insan Fahmi Siregar, "PASANG SURUT PERAN POLITIK MASYUMI DALAM PEMERINTAHAN (1945-1960)" 811, no. 5 (2008): 63 - 65.

¹⁵ Harry A. Poeze, *Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia jilid 3: Maret 1947-Agustus 1948* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Soedirman yang mendukung organisasi Persatuan Perjuangan. Menurut Tan Malaka, apabila ingin memperjuangkan bangsa, yang harus dilakukan pertama kali adalah membentuk Volksfront serta Minimum Program untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.¹⁶ Kemudian pada 15 hingga 16 Januari 1946 dilakukan kongres kedua Persatuan Perjuangan yang dilaksanakan di bekas Gedung Balai Agung Solo, dimana pada kongres kedua tersebut mendapat kesepakatan untuk menyetujui adanya Minimum Program dan disepakati hal-hal seperti berikut: (1) Melakukan perundingan atas pengakuan kemerdekaan 100%, (2) Pemerintah Rakyat, (3) Tentara Rakyat, (4) Melucuti senjata Jepang, (5) Mengurus tawanan Eropa, (6) Menyita dan melakukan pertanian, dan (7) Menyita dan melakukan perindustrian.¹⁷

Kemudian dengan adanya Volksfront, nama tersebut berganti menjadi Persatuan Perjuangan. Melalui Persatuan Perjuangan yang kemudian terdapat dua pendapat berbeda dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yakni menggunakan jalur diplomasi dan menggunakan perjuangan senjata. Adanya pembentukan kabinet Sjahrir II pada 2 Maret 1946 menimbulkan reaksi bahwa kabinet Sjahrir belum mampu mengupayakan koalisi sebaik-baiknya. Menurut Soebardjo, dengan adanya pembentukan kabinet Sjahrir maka makin banyak anggota dari kabinet tersebut yang tidak termasuk ke dalam pendukung kabinet Sjahrir. Sehingga, kemudian akhirnya berdampak pada terpecahnya Persatuan Perjuangan yang secara jelas tidak sejalan dengan pemerintahan pusat. Walaupun Persatuan Perjuangan memberikan pertentangan dalam jalur diplomasi kedaulatan Indonesia, namun ternyata adapun sisi positif yang dapat dijadikan sebagai penyeimbang maupun penyelarasan dalam mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia yang menginginkan kebebasan tanpa campur tangan pihak asing.

Penculikan Sutan Sjahrir

Oposisi Tan Malaka terhadap pemerintah Sjahrir diyakini tidak memberikan perjuangan bangsa, malahan membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁸ Pada Maret 1946, Sjahrir melakukan sabotase dengan memberikan catatan kecil kepada Van Mook yang hanya berisi tuntutan pengakuan kedaulatan secara *de facto* terhadap Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra.¹⁹ Pada 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan sebuah pidato di Yogyakarta dan mengungkapkan keterbatasan posisi berunding pemerintah. Kekuatan oposisi menganggap upaya perundingan sebagai salah satu pengkhianatan terhadap pengakuan kemerdekaan 100% Persatuan Perjuangan. Dengan adanya hal tersebut, golongan Persatuan Perjuangan merasa makin kecewa atas keputusan pemerintah.

¹⁶ Abdul Rohman, "Peran Persatuan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia Tahun 1946," *Journal Pendidikan Sejarah* 5, no. 3 (2017): 981 - 91.

¹⁷ Masdar Hilmi, "PENCULIKAN PERDANA MENTERI SJHRIR DI SURAKARTA TAHUN 1946," 2009.

¹⁸ Purnawan Basundoro, "Tan Malaka, Persatuan Perjuangan Dan Historiografi Indonesia Kontemporer," *Historia* 7, no 2 (2012): 97 - 110.

¹⁹ Hendri F. Isnaeni, "Ketika Tan Malaka Memilih Jadi Oposan," <https://historia.id/>, 2015, <https://historia.id/politik/articles/ketika-tan-malaka-memilih-jadi-oposan-PyJj5/page/2>.

Menindaklanjuti kekecewaan tersebut, akhirnya terjadilah penculikan Sjahrir di Surakarta dalam perjalanan pulang dari Jawa Timur.²⁰ Penculikan Sjahrir terjadi ketika Mayor Jusuf mendapatkan surat perintah dari Mayor Jenderal Soedarsono. Adanya surat perintah tersebut, Mayor Jusuf menghubungi Lettu Madijo untuk melakukan penculikan Sjahrir. Namun nyatanya Lettu Madijo menolak permintaan dari Mayor Jusuf sehingga perintah tersebut dilakukannya dengan dibantu oleh Kolonel Sutarto. Dengan adanya penculikan Sjahrir, muncul harapan yang memungkinkan Soekarno dan Soedirman untuk melakukan kemerdekaan 100% atas Republik. Namun sebaliknya, Soekarno malah memilih untuk mengumumkan keadaan perang dan meminta supaya Sjahrir dibebaskan. Pada 3 Juli 1946, Soekarno menyiarkan radio dengan menyatakan bahwa penangkapan Sjahrir akan mampu membahayakan persatuan bangsa. Sehingga pada malam 3 Juli, Sjahrir dibebaskan dan segera kembali ke Jakarta.

Disaat yang bersamaan, Soekarno dipaksa untuk memberhentikan kabinet Sjahrir dan dipaksa untuk menandatangani kabinet baru yang telah dibentuk oleh Persatuan Perjuangan yaitu "Dewan Pimpinan Politik" dan susunan kementerian negara baru. Ketika Mohammad Hatta datang, Soekarno segera menyerahkan surat dari Panglima Besar Soedirman²¹ yang berisi kabinet Sjahrir harus dibubarkan dan diganti dengan kabinet baru yang di dalamnya tercantum beberapa orang ternama dalam surat tersebut.²² Tak hanya itu, atas upaya penculikan Sjahrir pemerintah melakukan penahanan terhadap Tan Malaka dan golongan anggota Persatuan Perjuangan lainnya dengan maksud untuk menghindari timbulnya kekacauan pada masyarakat maupun perpecahan yang menghalangi politik pemerintah.

Dengan adanya penahanan tersebut, tentu menjadi pukulan keras bagi organisasi Persatuan Perjuangan. Kelompok yang mulanya bersatu, akhirnya tercerai berai. Pada 4 Juli 1946, sisa anggota Persatuan Perjuangan melakukan rapat untuk membahas mengenai lanjutan dari organisasi tersebut. Dari rapat yang telah dilakukan, sebagian peserta rapat ingin supaya organisasi Persatuan Perjuangan dapat dibubarkan, sedangkan yang lainnya ingin mendirikan suatu badan organisasi lain untuk menggantikan Persatuan Perjuangan. Pada 15 November 1946, diplomasi terus berjalan dimana pada saat itu dilakukan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, yang kemudian melalui perundingan tersebut menghasilkan perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 Maret 1947.²³ Pada 17 Agustus 1948, akhirnya Tan Malaka dibebaskan atas keputusan presiden Soekarno.

²⁰ M. Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946: Mengungkap Sejarah Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Media Press Indo, 2009).

²¹ Petrik Matanasi, "Sejarah Peristiwa 3 Juli 1946, Kudeta Pertama di Indonesia," <https://tirto.id/>, 2019, <https://tirto.id/sejarah-peristiwa-3-juli-1946-kudeta-pertama-di-indonesia-crSy>.

²² Warsinah, "SIKAP DAN PANDANGAN POLITIK PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA MASA KABINET SYAHRIR DAN MUNCULNYA PERISTIWA 3 JULI 1946 (SEBUAH TINJAUAN HISTORIS)" 1946 (2005).

²³ Ariffudin Zulkarnain, "Kiprah Politik Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan (1945-1947)," *Risalah* 1, no. 3 (2016).

SIMPULAN

Selama Sjahrir menjabat sebagai perdana menteri, kiprahnya sangat memegang peranan penting sejak tahun 1945 hingga 1946 terutama pada masa revolusi Indonesia. Dalam melakukan proses revolusioner bangsa terutama di bidang politik, karir Sjahrir dimulai ketika dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, dimana Sjahrir terpilih menjadi Ketua BP-KNIP dan Amir Sjarifuddin sebagai wakil ketua BP-KNIP untuk bekerjasama dengan Presiden Soekarno. Adapun partai Masyumi yang turut memberikan kontribusi dalam bidang politik mengenai permasalahan kebangsaan. Seringkali antara partai Masyumi dengan kabinet Sjahrir terjadi pertentangan, yang mana Masyumi kurang setuju apabila Sjahrir menempuh jalur diplomasi dengan pihak Belanda. Oleh karena itu, Masyumi juga menginginkan adanya oposisi pada kabinet Sjahrir sekaligus mengembalikan mandatnya ke Soekarno. Pertentangan antara kabinet Sjahrir dengan Masyumi makin memuncak ketika adanya perjanjian Linggarjati yang dianggap merugikan kedaulatan Indonesia.

Dalam upaya mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, muncul dua golongan yaitu golongan yang lebih memilih menggunakan jalur diplomasi dan golongan yang lebih memilih perjuangan bersenjata. Dalam hal ini, Presiden Soekarno selaku pemimpin bangsa lebih cenderung memilih untuk mempertahankan Indonesia dengan menggunakan jalur diplomasi. Namun demikian, pilihan Soekarno dan Sjahrir terhadap jalur diplomasi mendapat pertentangan dari kelompok Tan Malaka yang memilih untuk memperjuangkan wilayah Indonesia dengan cara perjuangan senjata. Pada 27 Juni 1946, Sjahrir melakukan sabotase dengan memberikan catatan kecil kepada Van Mook yang hanya berisi tuntutan pengakuan kedaulatan secara *de facto* terhadap Indonesia atas Jawa dan Sumatra. Dengan adanya hal tersebut, golongan Persatuan Perjuangan merasa makin kecewa akhirnya terjadilah penculikan Sjahrir di Surakarta pada 3 Juli 1946. Disaat yang bersamaan, Soekarno dipaksa untuk memberhentikan kabinet Sjahrir dan dipaksa untuk menandatangani kabinet baru yaitu "Dewan Pimpinan Politik".

Atas upaya penculikan Sutan Sjahrir, pemerintah melakukan penahanan terhadap Tan Malaka dan golongan anggota Persatuan Perjuangan lainnya. Pada 4 Juli 1946, sisa anggota Persatuan Perjuangan melakukan rapat untuk membahas mengenai lanjutan dari organisasi tersebut. Adanya pembentukan kabinet Sjahrir II pada 2 Maret 1946 menimbulkan reaksi bahwa kabinet Sjahrir belum mampu mengupayakan koalisi sebaik-baiknya. Menurut Soebardjo, dengan adanya pembentukan kabinet Sjahrir maka makin banyak anggota dari kabinet tersebut yang tidak termasuk ke dalam pendukung kabinet Sjahrir. Sehingga, kemudian akhirnya berdampak pada terpecahnya Persatuan Perjuangan yang jelas tidak sejalan dengan pemerintahan pusat. Pada 15 November 1946, diplomasi terus berjalan dimana pada saat itu dilakukan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, yang kemudian melalui perundingan tersebut menghasilkan perjanjian Linggarjati sedangkan Tan Malaka dibebaskan atas keputusan presiden pada 17 Agustus 1948.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad .J .A & Sumarno. "Organisasi Persatuan Perjuangan 1946" 2, no. 3 (2014).
- Adryamarthanino, Verelladevanka. "Sultan Sjahrir: Masa Muda, Kiprah, Penculikan, dan Akhir Hidup." *www.kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/22/080000479/sutan-sjahrir--masa-muda-kiprah-penculikan-dan-akhir-hidup?page=all>.
- Basundoro, Purnawan. "Tan Malaka, Persatuan Perjuangan Dan Historiografi Indonesia Kontemporer." *Historia* 7, no 2 (2012): 97–110.
- Hilmi, Masdar. "PENCULIKAN PERDANA MENTERI SJAHRIR DI SURAKARTA TAHUN1946," 2009.
- Ishaqro, Alfi Hafidh. "DINAMIKA PARTAI MASYUMI PADA MASA REVOLUSI FISIK (1945 – 1949)." *Plant Physiology* 1, no. 1 (1949): 11–19.
- Isnaeni, Hendri F. "Ketika Tan Malaka Memilih Jadi Oposan." <https://historia.id/>, 2015. <https://historia.id/politik/articles/ketika-tan-malaka-memilih-jadi-oposan-PyJj5/page/2>.
- Jumaidi, Susanto. "Sutan Sjahrir, Pahit Manis dalam Kemelut Revolusi Kemerdekaan Indonesia." <https://kumparan.com/>, 2022. <https://kumparan.com/susanto-jumaidi/sutan-sjahrir-pahit-manis-dalam-kemelut-revolusi-kemerdekaan-indonesia-1xulRUwz0Jo>.
- Khaldun, Ibnu, dan Edy Suparjan. "Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia." *SOSIOHUMANIORA : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 122–31.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Matanasi, Petrik. "Sejarah Peristiwa 3 Juli 1946, Kudeta Pertama di Indonesia." <https://tirto.id/>, 2019. <https://tirto.id/sejarah-peristiwa-3-juli-1946-kudeta-pertama-di-indonesia-crSy>.
- Nusferadi, Adi. "Pembentukan Kabinet Sjahrir I dan Jalan Perjuangan Diplomasi RI." *Jurnal Sejarah Lontar* 6, no. 2 (2009): 18–28. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/article/view/2511>.
- Poeze, Harry A. *Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia jilid 3: Maret 1947- Agustus 1948*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Reid, Anthony. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Rohman, Abdul. "Peran Persatuan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia Tahun 1946." *Journal Pendidikan Sejarah* 5, no. 3 (2017): 981–91.
- Sabiring, Umar, Syaiful M, dan Suparman Arif. "kebijakan politik perdana menteri sutan sjahrir untuk mempertahankan kemerdekaan RI." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 1689–99.
- Setiawan, Rofi. *KONFLIK POLITIK SUTAN SJAHRIR-TAN MALAKA TAHUN 1945-1947*, 2019.
- Setiawan Sumarno. "Sutan Sjahrir, Sosialisme, Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1927-1962." *Avatara* 9, no. 1 (2020): 1–9.

- Siregar, Insan Fahmi. "PASANG SURUT PERAN POLITIK MASYUMI DALAM PEMERINTAHAN (1945-1960)" 811, no. 5 (2008): 63–65.
- Suryani. Hania Hanafie. "Politik Indonesia." *Politik Indonesia* 1, no. 95 (2011): 87–101.
- Warsinah. "SIKAP DAN PANDANGAN POLITIK PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA MASA KABINET SYAHRIR DAN MUNCULNYA PERISTIWA 3 JULI 1946 (SEBUAH TINJAUAN HISTORIS)" 1946 (2005).
- Zara, M. Yuanda. *Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Sejarah Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Media Press Indo, 2009.
- Zulkarnain, Ariffudin. "Kiprah Politik Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan (1945-1947)." *Risalah* 1, no. 3 (2016).